Prof. Dr. Drs. H. Subardjo. SH., M.Hum

Cetta Media

KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA BANTU

**DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEDUDUKAN

LEMBAGA

NEGARA BANTU

DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. H. Subardjo, S.H., M.Hum.

KEDUDUKAN

LEMBAGA NEGARA BANTU

DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kutipan Pasal 72:

Sanksi Pelanggaran Undang-undang Hak Cipta
(UU No. 19 Tahun 2002)

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Cetta Media

KEDUDUKAN

LEMBAGA NEGARA BANTU

DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA

© 2014 Prof. Dr. H. Subardjo, S.H., M.Hum.
Hak cipta yang dilindungi undang-undang ada pada Penulis.
Hak penerbitan ada pada Penerbit Cetta Media Yogyakarta.

Penulis

Prof. Dr. H. Subardjo, S.H., M.Hum.

Desain Sampul

Tim Redaksi

Layouter

Tim Redaksi

Editor

Tim Redaksi

Cetakan I, Juli 2014

Diterbitkan oleh:

Penerbit **Cetta Media**

(KELOMPOK PENERBIT MARKUMI)

Minggiran MJ II/ 1323 RT.64/17 Yogyakarta

Telp./Fax. (0274) 6874768/ 413860

Website: www.markumi.com

Email: penerbitmarkumi@yahoo.com

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Penerbit Cetta Media, Redaksi Kedudukan Lembaga Negara Bantu
Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia/ Redaksi
Penerbit Cetta Media Yogyakarta – Yogyakarta 2014.
viii + 151 hlm., 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-602-97546-1-2

1. Ilmu Hukum

I. Judul

KATA PENGANTAR

ASSALAMUALAIKUM. WR. WB

Penulis merasa bahagia dan bersyukur kehadiran Allah SWT karena bisa menerbitkan buku tentang “Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia.”

Buku ini sangat penting bagi para mahasiswa Fakultas Hukum yang mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara. Mengingat hal itu di era demokrasi transisi disamping ada lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen muncul lembaga-lembaga negara sebagai penunjang lembaga negara yang resmi dalam era demokrasi transisi ini.

Lembaga-lembaga negara bantu ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga banyak menghadapi kendala-kendala atau tidak berjalan mulus karena adanya gesekan-gesekan dengan institusi yang diatur dalam UUD 1945.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu terbitnya buku ini. Harapan buku ini bermanfaat bagi para pengguna, serta kritik dan saran dari siapapun yang bersifat membangun sangat saya nantikan.

WAALAIKUMSALAM. WR. WB

Yogyakarta, Juli 2014

Penyusun,

Prof. Dr. Drs.H. Subardjo, SH., M.Hum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kerangka Teori	8
D. Bahan Hukum Primer	17
E. Metode Pendekatan Penelitian	19
F. Metode Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN DALAM KETATANEGARAAN RI DAN SEJARAH LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA INDONESIA	21
A. Sistem Pemerintahan Ketatanegaraan RI	21
1. Pembatasan Kekuasaan	21
2. Sistem Pemisahan kekuasaan (<i>separation of power</i>)	23
3. Sistem Pembagian Kekuasaan (<i>distribution atau division of power</i>)	24
B. Pengertian Lembaga Negara dan Lembaga Negara Bantu	25
1. Pengertian Lembaga Negara	25
2. Pengertian Lembaga Negara Bantu	26
C. Sejarah Lembaga – lembaga Negara Indonesia	34
1. UUD 1945 (Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949) secara yuridis formal	34

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat | 37
3. UUD Sementara 1950 (Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959) | 41
4. UUD 1945 (Periode 1959 – 1971) | 47
5. UUD 1945 (Periode 1971 – 1999) | 49
6. UUD 1945 (Periode 1999 – sekarang/ setelah perubahan) | 51

BAB III KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA BANTU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA | 77

- A. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara Bantu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia | 77
 1. Latar belakang munculnya Lembaga Negara Bantu | 77
 2. Kedudukan Lembaga Negara Bantu di Indonesia | 122
 3. Fungsi Lembaga Negara Bantu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia | 129
- B. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Negara Bantu dalam melaksanakan fungsinya | 135

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 141

- A. Kesimpulan | 141
- B. Saran | 144

DAFTAR PUSTAKA | 146

RIWAYAT PENGARANG | 151

KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA BANTU

DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Buku ini sangat penting bagi para mahasiswa Fakultas Hukum yang mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara. Mengingat hal itu di era demokrasi transisi disamping ada lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen muncul lembaga-lembaga negara sebagai penunjang lembaga negara yang resmi dalam era demokrasi transisi ini.

Lembaga-lembaga negara bantu ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga banyak menghadapi kendala-kendala atau tidak berjalan mulus karena adanya gesekan-gesekan dengan institusi yang diatur dalam UUD 1945.

Cetta Media

Penerbit **Cetta Media**
(KELOMPOK PENERBIT MARKUMI)
Minggiran MJ II/ 1323 RT.64/17 Yogyakarta
Telp./ Fax. (0274) 6874768/ 413860
Email. penerbitmarkumi@yahoo.com
Web. www.markumi.com

ISBN : 978-602-97546-1-2

9 786029 754612